

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN TINGKAT PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI (Studi Empiris pada Top 50 Emiten dengan Skor CG Tertinggi Hasil IICD melalui Pendekatan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* Periode 2012-2013)**

**Insan Thariq Alhamra**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

**Hermiyetti**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

**ABSTRACT**

*The object of this study is to analyze the influence of Good Corporate Governance and profitability to disclosure of accounting information. The results of this study can be used as a reference for investors to determine how far the influence of Good Corporate Governance and the level of profitability on the disclosure of accounting information on non-financial companies listed on the Stock Exchange in the period 2012-2013. This research used purposive sampling during 2012 to 2013 in order to obtain 20 samples. This research uses the analysis method descriptive, classic assumption test, test hypotheses using SPSS 20.*

*Hypothesis testing results show that the level of profitability is partially positive effect on the disclosure of accounting information, because it shows the success of the company's profitability thus affecting the level of disclosure of corporate accounting. Good Corporate Governance is partially no effect on the disclosure of accounting information, GCG has no effect on the disclosure of accounting information, because it is still a lack of attention companies IICG as an institution conducting the survey that showed weak CGPI Good Corporate Governance for companies tersebut. Secara simultaneous influence Good Corporate Governance and the level of profitability can be a positive influence on the disclosure of accounting information. Companies that have high levels of profitability and good corporate governance will tend to disclose more accounting information.*

*Key words: Good Corporate Governance, Level of Profitability, Disclosure of Accounting Information*

Banyak terjadinya kasus penyimpangan pada pengungkapan informasi akuntansi perusahaan besar membuat kepercayaan para pengguna informasi akuntansi, seperti investor, debitur, kreditor dan pihak lainnya berkurang atas kendala dari pengungkapan informasi akuntansi. Kasus yang menimpa Enron dan WorldCom menjadi salah satu contoh kasus penyimpangan yang terjadi di dalam pengungkapan informasi akuntansi. Beberapa kasus di Indonesia adalah kasus PT. Gas Negara yang melanggar pasal 86 ayat (2) UU Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1

tentang pengungkapan informasi akuntansi yang harus segera diumumkan kepada publik, karena terlambat melaporkan fakta atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT. PGN. Dalam hal ini keterlambatan pelaporan pengungkapan informasi akuntansi sebanyak 35 hari. Mengenai informasi penurunan volume gas dan informasi tertundanya gas ini dikategorikan sebagai fakta material dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1.

Pengungkapan Informasi akuntansi dalam laporan keuangan tahunan merupakan suatu komponen yang signifikan dalam mencapai sarana akuntabilitas publik. Perusahaan diharapkan lebih transparan dan akuntabel dalam pengungkapan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan menjadi dasar utama bagi para pengambil keputusan seperti investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya. Agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunanya, perusahaan memerlukan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Pengungkapan informasi akuntansi dalam laporan tahunan perusahaan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan / BAPEPAM dan LK telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-134/BL/2006 peraturan BAPEPAM Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan – perusahaan publik), sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diharuskan oleh peraturan. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Mekk, Roberts, & Gray, 1995). Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan setiap perusahaan berbeda tergantung pada kebutuhan maupun kondisi perusahaan, dan informasi strategis perusahaan dapat dituangkan dalam pengungkapan sukarela maupun pengungkapan yang bersifat wajib.

Pengungkapan informasi akuntansi secara sukarela dari informasi strategis secara bertahap lebih pada praktek umum perusahaan, karena bermanfaat sebagai petunjuk, seperti kemampuannya untuk membuat suatu perusahaan lebih unggul dari perusahaan lain (Santema *et al.*, 2005) dan kegunaannya dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh investor-investor profesional, bank, analis dan perantara keuangan (Higgings & Diffenbach, 1985). Sedangkan pengungkapan informasi sendiri merupakan salah satu prinsip dalam sistem *corporate governance*, yaitu transparansi. Baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan informasi sukarela merupakan cara untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Masalah *good corporate governance* menjadi menarik perhatian karena terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia tahun 1997 dan 1998, yang berkembang menjadi krisis multi dimensi berkepanjangan (Kartika, 2009). Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama,

konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor (Kaihatu, 2006). Untuk itulah, dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari sektor publik dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanace* nasional yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF) menjadi suatu isu yang mengemuka untuk diperbincangkan, dan merupakan sebagai alat atau pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG sendiri pada dasarnya merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sebagaimana disampaikan Sutedi (2011) dalam bukunya GCG, dijelaskan bahwa definisi GCG menurut Komite Cadbury (1992) adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan perusahaan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip GCG telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan GCG akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan GCG oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikian juga sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi GCG pada perusahaan tersebut semakin baik (Khomsiyah, 2003).

Beberapa penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara struktur *corporate governance* dengan pengungkapan informasi telah dilakukan oleh Foker (1992), Ho dan Wong (2000), dan Sabeni (2002). Pentingnya penelitian mengenai *corporate governance* dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG, mengingat pentingnya peran *corporate governance* dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi modern yang ditopang oleh pasar modal dan pasar uang (Witherell, 2000), meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Brayshaw, 2002).

Penelitian Ho dan Wong (2000) menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura & Taiwan) pada tahun 2000. Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi indeks

implementasi *corporate governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Penilaian terhadap kinerja *corporate governance* dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan, dimana profitabilitas diperlukan untuk menilai potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. *Return on equity* atau profitabilitas adalah suatu pengukuran dari penghasilan atau *income* yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. *Committee on terminology* mendefinisikan profitabilitas adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Sedangkan menurut APB *Statement* mengartikan profitabilitas adalah kelebihan (defisit) penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi (Harahap, 2001).

Prospek atau potensi sumber daya ekonomi yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan informasi akuntansi yang lebih luas pada laporan keuangan perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak pada laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan (Kartika, 2009). Hal ini sependapat dengan Saputri (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *good news* dapat ditandai dengan perolehan laba rugi tinggi maupun profitabilitas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan yang bersifat *nonmandatory* guna menunjukkan kinerja perusahaan yang baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan mendelegasikan otoritas kepada agen. Pihak prinsipal mempunyai wewenang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent, yang menjalankan wewenang dari prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian hubungan keagenan yang baik yaitu agen mempunyai kewajiban menjalankan wewenang dari prinsipal dan dapat mempertanggungjawabkan kerjanya kepada prinsipal.

Eisenhardt (1989) menjelaskan tentang tiga asumsi dasar sifat manusia untuk menjelaskan teori agensi, yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Oleh karena itu, berdasarkan asumsi dasar sifat manusia, bahwa

manusia itu bertindak *opportunistic* yaitu selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu mengutamakan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memperhatikan pihak lain yang dirugikan. Gusti (2012) menyatakan bahwa manajer sebagai manusia kemungkinan besar bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan pribadinya.

Teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kondisi perusahaan. Agen memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi perusahaan karena agen yang menjalankan kinerja perusahaan terkait dengan wewenang yang diberikan principal (Jensen & Meckling, 1976). Ketidakseimbangan informasi tersebut menimbulkan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen. Informasi cukup yang dimiliki agen bisa dimanfaatkan pihak agen untuk melakukan kecurangan kepada pihak lain yaitu prinsipal. Kondisi demikian menimbulkan pihak agen untuk melakukan manipulasi pelaporan keuangan untuk mengelabui pihak prinsipal. Adanya asimetri informasi menimbulkan pihak agen melakukan manipulasi laba demi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan adanya asimetri informasi yang dimiliki untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal (Widyaningdyah, 2001).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan masalah keagenan atau *agency problem*. Salah satu hal yang menyebabkan *agency problem* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi (*information asymmetry*) yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak memiliki banyak informasi dibandingkan dengan pihak lain yang memiliki sedikit informasi sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi (Masdupi, 2005). Manajer memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan pemegang saham karena sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan. Informasi yang lebih sedikit yang dimiliki oleh pemegang saham dapat memicu manajer menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk mengelola laba yang dilaporkan (Rusmin, 2010). Karena adanya perbedaan informasi yang diperoleh, maka memungkinkan salah satu pihak untuk melakukan manipulasi/kecurangan yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen (*management effort*) untuk melakukan *earning management* (Amijaya, 2013). Permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan tujuan dan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problems*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan.
2. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya pada dasarnya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pemegang saham atau pihak luar. Dan Informasi yang mengandung

fakta yang akan digunakan pemegang saham untuk mengambil keputusan tidak diberikan seutuhnya oleh manajer.

*Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara dewan komisaris, manajemen perusahaan, dan para pemegang saham. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang berdasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Shleifer & Vishny, 1997). *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek – proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Rahmita, 2013). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

### Laporan Keuangan

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Definisi laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2002), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Definisi lain mengenai laporan keuangan yaitu penyajian informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan sebagai dasar utama dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Dasar pembuatan laporan keuangan adalah jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya yang telah diposting ke buku besar (Harsasi, 2013).

Definisi lainnya yaitu laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008). Adapun laporan keuangan menurut Helfert (2001) adalah:

Seperangkat laporan yang biasanya terdiri dari neraca untuk periode tertentu, laporan operasi untuk periode tertentu, dan laporan arus dana untuk periode yang sama, ditambah dengan laporan khusus yang menjelaskan perubahan ekuitas kepemilikan pada neraca.

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut peraturan Bapepam Nomor: VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari: Neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan Rugi Laba yang merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan. Laporan Arus Kas yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dengan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Catatan Atas Laporan Keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

### **Pengungkapan Informasi Akuntansi**

Pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keputusan investasi, kredit, dan semacamnya. Informasi keuangan yang dapat dilayani oleh pelaporan keuangan (*financial reporting*) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor. FASB mengidentifikasi lingkup (*scope*) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut (Suwardjono, 2005): (1) Statement keuangan (*financial statement*), (2) Catatan atas statement keuangan (*notes to financial statement*), (3) Informasi perlengkapan (*supplementary information*), (4) Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*), (5) Informasi lain (*other information*).

Komponen 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang disebut basic financial statement yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton (1970) disebut rerangka atau struktur akuntansi pokok (*basic accounting structure*). Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen yaitu komponen 1 sampai dengan 4. Walaupun dapat disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan (*mandatory*) oleh penyusun standar akuntansi atau oleh badan pengawas (seperti SEC) melalui peraturan-peraturannya. Penyusun standar (FASB / IAI) dapat mewajibkan pengungkapan untuk komponen 1 sampai 3 dan untuk komponen 3 tingkat wajibnya hanya sampai pada batas sangat merekomendasi (*strongly recommend*). Jadi secara praktis, pengungkapan wajib melalui standar akuntansi hanya diberlakukan untuk komponen 1, 2 dan dalam kondisi tertentu komponen 3 (Suwardjono, 2005).

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement

keuangan. Evans (2003) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

Pengungkapan berarti memberikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan sendiri, catatan atas laporan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan. Pengungkapan tidak mencakup pernyataan publik atau swasta yang dibuat oleh manajemen atau informasi yang diberikan di luar laporan keuangan.

Evans (2003) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal.

Evans (2003) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*). Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan dalam lingkup 1 sampai 3 adalah pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela (Suwardjono, 2005).

### **Good Corporate Governance**

Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 - melalui apa yang dikenal dengan sebutan *Cadbury Report* - mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

*Center for European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain. GCG, papar pusat studi ini, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya



adalah mekanisme dari hak-hak tersebut (Arsasi, 2013). Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD), umpamanya mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya (Arsasi, 2013). Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *Accountability, Transparency, Predictability* dan *Participation*. Pengertian lain datang dari *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Kamal, 2008). Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.

Secara harfiah, *governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Adapun dalam konteks GCG, *governance* sering juga disebut “tata pamong”, atau penafsiran - yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Maklum, istilah itu berasal dari Melayu. Namun tampaknya secara umum di kalangan pebisnis, istilah GCG diartikan *corporate governance*, meskipun masih rancu dengan terminologi manajemen. Masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar (Supomo, 2008).

GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan: (1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya. (2) Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. (3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Berdasarkan pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis (Septian, 2014), yakni;

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut

- (keseimbangan internal).
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan eksternal), di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya.
  3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (insider information for insider trading).

### **Tingkat Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Kondisi profitabilitas yang baik akan mendorong para investor untuk melakukan investasi kedalam perusahaan tersebut. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2001). Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan para pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan pajak. Oleh karena itu, dividen diambil dari keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan, maka keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya dividen payout ratio yang dibagikan perusahaan. Perusahaanan yang keuntungannya relatif teratur seringkali memperkirakan bagaimana membagikan dividennya dikemudian hari, 55 maka perusahaan seperti itu kemungkinan besar akan membagikan laba dalam bentuk dividen dengan presentase yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang berfluktuasi. Perusahaan yang keuntungannya kurang teratur tidak yakin betul apakah harapan kemungkinan dalam tahun-tahun mendatang dapat terlaksana, oleh karena itu, dana keuntungan yang sekarang ini akan ditahan dengan bagian yang cukup besar, sebab dividen yang lebih rendah lebih mudah dipertahankan apabila keuntungannya agak menurun dikemudian hari.

Oleh karena itu dividen diambil dari laba bersih yang diperoleh perusahaan maka laba tersebut akan mempengaruhi besarnya dividen Payout Ratio yang akan diberikan oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai laba lebih akan membayar

dengan porsi laba yang lebih besar sebagai dividen, semakin besar laba yang diperoleh semakin besar pula kemampuan perusahaan membayar dividen. Profitabilitas diindikasikan dengan return on equity (ROE), dimana ROE mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka rasio ini juga akan semakin besar

## Hipotesis

### **Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi Akuntansi**

Hasil penelitian Khomsiyah (2003), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan GCG dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi *corporate governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Selanjutnya dalam penelitian Hidayah (2008), membuktikan keterkaitan *good corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan, dan membuktikan pengaruh pengungkapan wajib dan ketepatanwaktuan penyampaian informasi terhadap hubungan antara GCG dengan kinerja perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* ternyata tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan, demikian juga untuk pengungkapan informasi wajib dan ketepatan waktuan penyampaian informasi ternyata bukan merupakan variabel moderating.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003), hasil penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2013) menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif *corporate governance* terhadap luas pengungkapan informasi akuntansi. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa semakin tinggi indeks *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan informasi yang sangat lengkap. Begitu juga apabila indeks *corporate governance* semakin rendah maka pengungkapan informasi juga akan berkurang.

Pada prinsipnya keberadaan mekanisme GCG memberikan gambaran terhadap kualitas informasi akuntansi melalui seperangkat peraturan institusional dalam perusahaan (Li & Qi, 2008). Pelaporan informasi keuangan suatu perusahaan, sangat berhubungan dengan mekanisme GCG yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas pengungkapan informasi akuntansi. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi perusahaan**

**Tingkat Profitabilitas dan Pengungkapan Informasi Akuntansi**

Rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab manajer ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan (Singhvi & Desai, 1971). Hal ini terkait dengan bonus/kompensasi yang diterima oleh manajer atas pencapaian profit yang dicapainya. Simanjuntak dan Widiastuti (2004) memberikan hasil bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan, namun sebaliknya, Benardi *et al.*, (2009) memberikan hasil bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Alasannya adalah dikarenakan tingginya kinerja keuangan merupakan suatu keharusan karena kondisi keuangan yang profit akan memudahkan perusahaan menjalankan operasionalnya sehari-hari (Benardi *et al.*, 2009).

Kokubu *et al.*, (2001) juga menjelaskan terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan informasi akuntansi perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi perusahaan yang lebih luas, untuk mengurangi biaya keagenan yang muncul. Penelitian Nurkhin (2008) dan Sitepu dan Siregar (2009) berhasil menemukan pengaruh positif antara kedua variabel tersebut. Sedangkan Sembiring (2005) dan Sari dan Kholisoh (2009) tidak menemukan adanya pengaruh.

Dengan demikian, profit sebagai perwujudan dari hasil usaha atau kinerja dari manajer, dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, kemungkinan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin luas. Berdasarkan uraian di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

## **H2 : Tingkat Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi perusahaan**

### ***Good Corporate Governance* dan Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi**

Dalam penelitian Kusumawati (2006), menguji secara empiris apakah profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan GCG dalam laporan keuangan. Kajian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan GCG. Hal ini menyiratkan bahwa ketika perusahaan sedang menghadapi penurunan keuntungan, mereka akan cenderung memberikan pengungkapan tentang penerapan *corporate governance* dalam rangka untuk meringankan tekanan pasar. Hasilnya adalah konsisten dengan penelitian lain pada pengungkapan GCG yang dilakukan di Kanada oleh Bujaki dan McConomy (2002). Hasil penelitian juga mendukung manajemen "*light-and-shadow management*" dibantah oleh Jackson dan Carter (1995).

Menariknya, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) menggunakan indeks GCG yang sama membuktikan bahwa pengungkapan GCG bersama dengan variabel lain dalam *corporate governance*, dinilai oleh investor. Dengan kata lain, investor bersedia membayar premi yang lebih tinggi untuk

perusahaan yang praktik GCG dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, investor atau pemegang saham harus hati-hati terhadap pengungkapan perusahaan secara komprehensif sejak pengungkapan itu sendiri dapat digunakan oleh manajemen untuk menjelaskan (Kusumawati, 2006). Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

**H3 : *Good Corporate Governance* dan tingkat profitabilitas secara bersama – sama berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi perusahaan**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang sudah *listing* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dimuat di IDX tahun 2012-2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling method*, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan berdasarkan kriteria tertentu.

### Definisi Operasional Variabel

#### Pengungkapan Informasi Akuntansi

Pada variabel ini mengukur berapa banyak butir laporan keuangan yang material diungkap oleh perusahaan diukur dengan indeks disclosure. Indeks Pengungkapan merupakan hasil pembagian antara skor pengungkapan yang telah diraih dengan total nilai maksimum yang mungkin diraih (Subiyantoro, 1996). Dalam melakukan perhitungan indeks, peneliti menggunakan cara yang digunakan oleh Subiyantoro (1996) dimana item-item informasi yang digunakan mencakup *mandatory and voluntary*. Jika jumlah item yang dijadikan pedoman kelengkapan pengungkapan berjumlah 100 sedangkan yang dipenuhi perusahaan dalam laporan tahunannya sebanyak 60, maka indeksnya sebesar  $60/100=0,6$ . Jadi rumusnya adalah:

$$IP = \frac{\text{Jumlah butir pengungkapan dipenuhi}}{\text{Jumlah semua butir yang dipenuhi}}$$

#### Indeks *Corporate Governance*

Indeks *Corporate Governance* adalah hasil riset secara independen yang dilakukan oleh IICG bekerjasama dengan Majalah SWA untuk menentukan pemeringkatan perusahaan dalam penggunaan *corporate governance* di Indonesia.

#### Tingkat Profitabilitas

Alat ukur yang dapat digunakan sebagai menghitung profitabilitas salah satunya adalah *Return on Equity* (ROE) merupakan alat analisis keuangan untuk mengukur sejauh mana efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba (Helfert, 1997). Pengukuran tingkat profitabilitas menurut Martin (1993) adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Ekuitas}}$$

### Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis mengenai analisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*multiple regression*). Adapun model regresinya adalah sebagai berikut:

$$IP = \alpha + \beta_1 CGPI + \beta_2 ROE + \varepsilon$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas kedua yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Hasil uji *kolmogorov-smirnov* tersebut ditunjukkan menunjukkan nilai sebesar 0.981. Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena nilainya lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ .

#### Uji Multikolinearitas

Terjadinya multikolinearitas dalam suatu penelitian dapat dilihat dari nilai TOL dan VIF yang terdapat pada masing-masing variabel independen. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika memiliki nilai *tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10. Berdasarkan hasil penelitian semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

#### Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Berdasarkan hasil uji Glejser terlihat bahwa pada variabel CGPI probabilitas menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.237 ( $0.237 > 0.05$ ) kemudian pada variabel ROE probabilitas menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.97 ( $0.97 > 0.05$ ), oleh karena itu dari hasil probabilitas kedua variabel independen dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.235	.264		-.890	.386
1 CGPI	.004	.003	.416	1.226	.237
ROE	-.001	.027	-.013	-.039	.970

a. Dependent Variable: IP

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini nilai dari  $R^2$  dilihat dari tabel *adjusted R-Square*-nya. Dalam penelitian ini didapatkan nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.462 untuk model IP. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 46.2% variasi di dalam IP dapat dijelaskan oleh variabel CGPI dan ROE, sedangkan 53.8% tingkat variasi dalam IP dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian.

### Uji F

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 <sup>a</sup>	.462	.399	.115385

a. Predictors: (Constant), ROE, CGPI

b. Dependent Variable: IP

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.194	2	.097	7.296	.005 <sup>b</sup>
1 Residual	.226	17	.013		
Total	.421	19			

a. Dependent Variable: IP

b. Predictors: (Constant), ROE, CGPI

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat atau dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 0.05 serta derajat bebas (*degree of freedom*) regresi sebesar 2 dan derajat bebas (*degree of freedom*) residual sebesar 3.59. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

## Uji T

Uji T bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual yaitu CGPI dan ROE dalam menerangkan variabel dependen yaitu IP. Uji T berapa pada tingkat signifikansi 0.05. Jika nilai probabilitas T lebih kecil dari 0.05 maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berikut hasil pengujiannya: Berdasarkan hasil uji statistik T pada

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.497	.519		2.884	.010
1 CGPI	-.008	.006	-.365	-1.341	.198
ROE	.175	.052	.913	3.352	.004

a. Dependent Variable: IP

Tabel 4.7, terlihat bahwa variabel independen ROE menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu IP dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk ROE 0.004 (sig.<5%). Berdasarkan pada Tabel 4.7 dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi berganda pada penelitian ini yang dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$IP = 1.4797 - 0.008CGPI + 0.175ROE + \varepsilon$$

Koefisien konstanta sebesar 1.4797 bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa IP akan bernilai 1.4797 apabila masing – masing variabel CGPI dan ROE bernilai 0. Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil uji analisis T yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Variabel CGPI dilihat dari T hitung > T tabel (-1.341 > -2.10982) maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Probabilitas menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.198. Hal tersebut membuktikan bahwa CGPI tidak memiliki pengaruh terhadap IP.

Variabel ROE memiliki koefisien regresi sebesar 0.175. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap IP. Hal ini menggambarkan pula bahwa setiap kenaikan variabel IP sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan nilai IP sebesar 0.175. Nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0.913 berarti variabel IP mempengaruhi variabel dependen sebesar 0.913. Jika dilihat dari T hitung > T tabel (3.352 > 2.10982) maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Probabilitas menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.004. Hal tersebut membuktikan bahwa ROE berpengaruh terhadap IP.



### **Pembahasan Hasil Penelitian**

GCG pada penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi. Dalam penelitian ini nilai terendah dari CGPI pada perusahaan non-keuangan yang termasuk dalam top 50 emiten pengguna ASEN CG *Score Card* adalah sebesar 66, nilai tertinggi sebesar 91, dan rata – rata skor CGPI sebesar 82 dengan tingkat variabilitas CGPI terhadap nilai rata – rata dapat dikatakan rendah yaitu sebesar 6.4519106. Hal tersebut menunjukkan bahwa skor CGPI yang diperoleh perusahaan bukan menjadi tolak ukur atas pengungkapan informasi akuntansi perusahaan. GCG perusahaan dapat dikatakan sudah baik apabila perusahaan memberikan perhatian yang cukup pada lembaga IICG untuk memberikan data primer dan tidak membatasi informasi agar upaya untuk memberikan skor CGPI lebih maksimal.

Tingkat Profitabilitas dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi. Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan ROE perusahaan yang merupakan rasio hasil perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, rasio tingkat profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan hasil akhir dari suatu kebijakan dan keputusan – keputusan operasional perusahaan. Dalam penelitian ini tingkat profitabilitas (ROE) digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas laba yang dihasilkan dari modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan, dan juga untuk mengetahui tingkat pengungkapan informasi akuntansi perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan perusahaan sehingga mempengaruhi tingkat pengungkapan, bukan hanya pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka pada saat itu perusahaan memperoleh laba yang rendah juga dituntut untuk perlu mengungkapkan informasi akuntansi mereka.

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau *F test*, dapat disimpulkan bahwa variabel independen CGPI dan ROE mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen IP. Hasil dari uji F ini menjelaskan bahwa kedua variabel independen tersebut dapat dijadikan sebagai pengukur tingkat variabel dependen yaitu IP. Hal ini menyiratkan bahwa dengan GCG yang baik dalam hal transparansi dan juga dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maka perusahaan dapat mengungkapkan informasi akuntansi mereka.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **Simpulan**

1. Secara parsial GCG tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi, sedangkan secara parsial tingkat profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi.
2. Secara simultan GCG dan tingkat profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi.

### **Keterbatasan**

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melihat nilai indeks CG yang dikeluarkan oleh IICG sehingga tidak diketahui secara detail tinggi rendahnya nilai indeks pada setiap kriteria penilaian indeks CG.
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas sehingga belum valid dalam hasil yang diperoleh.
3. Periode pengamatan kurang luas, sehingga hasil penelitian belum dapat memprediksi jangka panjang dan belum dapat mengikuti perkembangan dalam menilai pengungkapan informasi akuntansi.

### **Saran**

1. Melakukan penelitian pada satu jenis usaha dengan periode sampel yang lebih lama dan variabel lain untuk menjelaskan pengaruh terhadap pengungkapan, sehingga diharapkan sampel yang diambil dapat mewakili praktik CG dengan lebih baik.
2. Melakukan penambahan variabel independen pada penelitian berikutnya, karena 2 variabel penelitian dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan secara penuh variabel dependen. Serta menambahkan jumlah sampel pada penelitian berikutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arens, A.A., Randal, J.R., & Mark, S.B. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. England: Pearson.
- Anik, F. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. February 3, 2015. Universitas Negeri Semarang. [http://lib.unnes.ac.id/18049/1/7211\\_409097.pdf](http://lib.unnes.ac.id/18049/1/7211_409097.pdf)
- Bapepam. (2015). *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. February 4, 2015. <http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf>
- Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2013). *Fundamentals of Financial Management*. United States: Cengage Learning.
- Effendi, M.A. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eisenhardt, K.M. (1989). *Building Theories From Case Study Research*. February 4, 2015. <http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/acrew/eisenhardt.pdf>
- Fakhrudin, H.M. (2008). *Go Public: Strategi Pendanaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- FCGI. (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. January 26, 2015. [https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi\\_booklet\\_ii.pdf](https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf)
- Ghozali, I., & Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (3rd ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IDX. (2015). *Ekuitas*. February 4, 2015. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/saham.aspx>
- Jensen, M.C., & W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No.4, pp 305-360.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Desember 4, 2015. [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf)
- KNKG. (2013). *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. January 26, 2015. [http://www.knkg-indonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Draft Pedoman GCG Perbankan \(singkatan\) 9 Jan 2013.pdf](http://www.knkg-indonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Draft%20Pedoman%20GCG%20Perbankan%20(singkatan)%209%20Jan%202013.pdf)
- Pesek, W. (2011). *Olympus, Skandal Korporasi Baru di Jepang*. January 26, 2015. Indonesia Finance Today. <http://www.indonesiainfincetoday.com/read/16661/Olympus-Skandal-Korporasi-Baru-di-Jepang>
- Schroeder *et al.*, (2011). *Financial Accounting Theory and Analysis*. United States: John Wiley & Sons, Inc.
- Scott, W.R. (2006). *Financial Accounting Theory, 4<sup>th</sup> edition*. Toronto: Pearson Education, Inc.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (6th ed.)*. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
- Sulistiyanto, H. Sri, & Haris, W. (2003). *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia*. January 27, 2015. <http://researchengines.com/hsulistiyanto3.html>
- Gulo, Y. (2000). *Analisis Efek Luas Pengungkapan sukarela Dalam Laporan Tahunan Terhadap Cost Of Equity Capital Perusahaan, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 2, no. 1*
- Gunawan, I. (2002). *Pengaruh Kelompok Industri, Basis perusahaan, Dan Tingkat Return Terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan: Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta. Tesis Master. Universitas Gajah Mada.*
- Gunawan, Y. (2001). *Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. Makalah Dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV*

- Subiyantoro, E. (1996). *Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia*. Tesis Master. Universitas Gajah Mada.
- Subroto, B. (2003). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Kepada Ketentuan Pengungkapan Wajib Oleh Perusahaan-peusahaan Publik Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Para Investor Di Pasar Modal*. Disertasi. Universitas Gajah Mada.
- Suripto, B. (1998). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan*. Tesis Master. Universitas Gajah Mada.
- Kaihatu, T. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.8 No.1.Maret 2006:1-9
- IICG, (2001). *“Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan”*. Edisi Ketiga, Jakarta
- OJK, (2004). *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*. Desember 4, 2015. <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a476310042e2a54bbc09fc384c61d9f7/Indonesia+CG+Roadmap.pdf?MOD=AJPERES>